BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era zaman sekarang, konsep syariah telah berkembang menjadi tren dalam ekonomi global, mencakup berbagai sektor seperti produk makanan, minuman, keuangan, serta gaya hidup.¹ Pada awalnya, konsep syariah umumnya diterapkan dalam dunia perbankan. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin akrab dengan kata dan istilah "syariah". Hal ini mendorong munculnya berbagai bank dan lembaga yang mengadopsi sistem syariah dalam kegiatan bisnis mereka.²

Salah satu indikasi adanya kebutuhan masyarakat terhadap produk berbasis syariah terlihat dari meningkatnya minat dan penyelenggaraan pariwisata yang berlandaskan prinsip syariah.³ Sektor pariwisata di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan saat ini menempati posisi kedua sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara setelah sektor industri kelapa sawit, pada tahun 2016 sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dengan nilai mencapai USD 15,965 miliar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015, sektor ini masih berada di urutan keempat dalam hal sumbangan

¹ Muhammad Fadhlan dan Ganjar Eka Subakti, "Perkembangan Industri Wisata Halal Indonesia dan Dunia," *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (24 Juni 2022): Hal 2, <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14385>.

² Fendy Kurniawan dan Lia Ardiana Safitri, "Mekanisme Penerapan Wisata Halal Dalam Menunjang Operasional Kerja Di Wyndham Sundancer Resort Lombok," *Jurnal Hotelier* 9, no. 1 (27 Juni 2023): Hal 1.

³ Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis dan Rahma Dani, "Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016," *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (4 Desember 2022): Hal 2.

terhadap devisa nasional, pada tahun 2015 sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar USD 12,225 miliar, menempatkannya di posisi keempat setelah sektor minyak dan gas sebesar USD 18,574 miliar, kelapa sawit sebesar USD 16,427 miliar, dan batu bara sebesar USD 14,717 miliar. Kondisi ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, yang pertumbuhannya didorong oleh bertambahnya jumlah destinasi serta meningkatnya investasi. Pariwisata berperan penting sebagai faktor kunci dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pengembangan kegiatan usaha, serta peningkatan pendapatan negara melalui ekspor.⁴

Dalam Al-Qur'an sendiri menganjurkan berpariwisata yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Kegiatan ini juga menumbuhkan rasa syukur terhadap ciptaan Allah Swt.⁵

Allah Swt. berfirman dalam surah al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Oleh karena itu, jelajahi setiap penjuru bumi, berkelanalah ke seluruh pelosoknya, dan nikmatilah sebagian rezeki yang Allah sediakan untukmu, serta

⁴ Erda Nuraini, Nouvanda Hamdan Saputra, dan Lusi Kholisiah, “Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung),” *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship* 1, no. 2 (30 April 2019): Hal 1, <https://doi.org/10.54268/baskara.v1i2.5699>.

⁵ Devi Setya, “Yuk Traveling! Ini Ayat Al-Qur'an Tentang Menjelajah Bumi,” diakses 27 November 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096532/yuk-traveling-ini-ayat-al-quran-tentang-menjelajah-bumi>.

bersyukurlah atas segala karunia-Nya. Sebab, pada akhirnya, hanya kepada-Nyalah kamu akan kembali setelah dibangkitkan.⁶

Pemerintah melalui regulasinya berupaya mendukung perkembangan industri pariwisata, termasuk di dalamnya pariwisata dengan konsep halal. Pariwisata halal (*halal tourism*) tidak terbatas pada aktivitas ziarah atau kunjungan ke lokasi-lokasi bernuansa religius, tetapi juga mencakup penyediaan berbagai fasilitas penunjang, seperti restoran dan akomodasi, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim sesuai dengan standar syariah yang berlaku.⁷

Konsep pariwisata halal didasarkan pada prinsip-prinsip halal dan haram yang mencakup aspek yang lebih luas dari sekadar produk konsumsi, melainkan juga mencakup seluruh layanan dan aktivitas wisata serta keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal merupakan sebuah konsep yang mencakup beragam jenis destinasi wisata, selama destinasi tersebut mampu menjauhkan wisatawan dari perbuatan yang dilarang serta mendorong kepada aktivitas yang bernilai positif dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Selain peran pemerintah, kalangan ulama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut berkontribusi dengan mengeluarkan fatwa yang berfungsi sebagai

⁶ “Surat Al-Mulk Ayat 15: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 27 November 2024, <https://quran.nu.or.id/al-mulk/15>.

⁷ Aan Jaelani, “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects,” *International Review of Management and Marketing* 7, no. 3 (1 September 2017): hlm 26.

⁸ Mochammad Arif Budiman dkk., *Opportunity and Threat of Developing Halal Tourism Destinations: A Case of Banjarmasin, Indonesia* (International Journal of Economic Behavior and Organization, 2019), hlm 8.

acuan atau standar dalam penyelenggaraan pariwisata yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu tercantum pada “Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.” Dalam konteks kepariwisataan, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk mendefinisikan pariwisata dengan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti pariwisata halal, pariwisata syariah, *Muslim Friendly Tourism*, hingga *Islamic Tourism*. Meskipun memiliki beragam istilah, seluruh konsep tersebut memiliki kesamaan mendasar, yakni merupakan aktivitas perjalanan yang diselenggarakan dengan dukungan sarana, prasarana, serta layanan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁹

Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur perbedaan antara istilah wisata syariah dan wisata halal, meskipun kedua konsep tersebut merujuk pada prinsip-prinsip yang serupa dalam penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki landasan yang sama, yaitu ajaran agama Islam, dengan tujuan utama untuk menghindarkan umat manusia dari hal-hal yang negatif dan mendekatkan mereka kepada kebaikan serta kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ma'ruf Amin, dalam acara Diskusi *Transmedia Institute* menjelaskan bahwa persepsi yang sering keliru justru muncul pada istilah wisata halal dan wisata religi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang tepat mengenai perbedaan antara keduanya, padahal keduanya memiliki konteks yang berbeda meskipun sering

⁹ N. Fitri Ani Gayo Amirah Ahmad Nawawi, Burhanuddin Amak Arif Fakhruddin, dan Atmo Prawiro Triyo Supriyatno, *Pariwisata Halal Indonesia* (Q-Media, 2020), hlm 3, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2025>.

dianggap serupa. Menurut beliau, yang dimaksud dengan wisata halal adalah layanan yang disediakan di suatu destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan kaum Muslim, baik dari segi ibadah, konsumsi, maupun kenyamanan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁰

Di Kabupaten Banjar ada salah satu wisata yang sangat sering dikunjungi dan jarang sepi pengunjung yaitu destinasi wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin, yang mana pada wisata ini banyak terdapat beberapa fasilitas wisata yang biasa didatangi oleh masyarakat umum, seperti air terjun, taman bermain, kebun binatang, museum, kolam belanda, taman konservasi, dan yang paling ramai dan jadi langganan pengunjung ialah *take off paralayang* dan juga *camping ground*.¹¹

Gubernur Kalimantan Selatan Periode 2021-2024 Sahbirin Noor sering mempromosikan daerahnya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu contohnya adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, yang terus diperindah untuk menarik minat wisatawan, khususnya dari IKN. Terletak di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, tempat ini telah lama menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan dan dikelola oleh Dinas Kehutanan (Dishut), yang bertanggung jawab atas pemeliharaan serta pengembangan kawasan tersebut. Sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Selatan, dengan objek wisatanya seperti Tahura Sultan Adam,

¹⁰ Danang Sugianto, "Ma'ruf Amin Luruskan Wisata Halal yang Sering Salah Kaprah," *detikfinance*, diakses 14 Maret 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5836970/maruf-amin-luruskan-wisata-halal-yang-sering-salah-kaprah>.

¹¹ Hasil Observasi Wisata Tahura Sultan Adam Pada Hari Minggu 10 Juni 2024\

diperkirakan akan semakin menarik perhatian para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, seiring dengan pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang terus berlangsung.¹²

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan agar kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di Kabupaten Banjar dapat berkembang menjadi destinasi wisata internasional. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memperkenalkan potensi alam Kalimantan Selatan ke pasar global. Pada tahun 2023, jumlah pengunjung Tahura Sultan Adam mencapai 400 ribu orang, yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7 miliar. Capaian ini menunjukkan potensi besar kawasan tersebut sebagai destinasi wisata yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah. Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel menyatakan, "Kawasan Tahura Sultan Adam menjadi fokus utama dalam pengembangan wisata unggulan Kalimantan Selatan (Kalsel), namun pengembangannya tetap memperhatikan dan mengutamakan fungsi utamanya sebagai kawasan konservasi,"¹³

Mengingat besarnya potensi wisata Tahura Sultan Adam sebagai prioritas dalam pengembangan wisata unggulan Kalimantan Selatan (Kalsel) dan destinasi yang semakin populer, penulis sangat tertarik untuk mengangkat bagaimana

¹² Kompas Cyber Media, "Kalsel sebagai Gerbang IKN, Obyek Wisata Tahura Sultan Adam Terus Dipercantik Halaman all," KOMPAS.com, 11 Desember 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/11/101152578/kalsel-sebagai-gerbang-ikn-obyek-wisata-tahura-sultan-adam-terus>.

¹³ mediaindonesia.com susanto denny, "Tahura Sultan Adam Ditargetkan Jadi Destinasi Wisata Internasional," diakses 19 November 2024, <https://mediaindonesia.com/nusantara/635973/tahura-sultan-adam-ditargetkan-jadi-destinasi-wisata-internasional>.

pelaksanaan destinasi wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Dalam Perspektif Konsep Wisata Syariah dan apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tersebut yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi berjudul, **“Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam Perspektif Konsep Wisata Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam perspektif konsep wisata syariah?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wisata syariah pada destinasi wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam perspektif konsep wisata syariah;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wisata syariah pada destinasi wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan penulis, pembaca, masyarakat umum, mahasiswa, serta peneliti selanjutnya, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, mengenai bagaimana pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam Karang Intan dalam menerapkan tinjauan prinsip destinasi wisata syariah.
2. Secara Praktis untuk dapat dijadikan pemikiran, inovasi, solusi, hingga bahan evaluasi oleh pihak-pihak yang terkait pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wisata syariah pada destinasi wisata tahura sultan adam kecamatan karang intan kabupaten banjar dalam menerapkan tinjauan prinsip destinasi wisata syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut KBBI, berarti tindakan atau perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan, keputusan, atau hal lainnya.¹⁴ Pelaksanaan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan prinsip wisata syariah yang terjadi di wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Mandiangin Kabupaten Banjar.

¹⁴ “Arti Kata Pelaksanaan - KBBI VI Daring,” diakses 15 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>.

2. Wisata Syariah

Wisata Syariah adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai Syariah dan selama perjalannya dalam melakukan jbadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan Syariah seperti makan minum yang *halalan thayyibah*.¹⁵

Wisata syariah yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan wisata yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang merujuk pada “fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah,” dengan penekanan pada kriteria destinasi wisata syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan penulis untuk menemukan gambaran dan menghindari adanya duplikasi penelitian Di antara penelitian yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Salma Razwa tahun 2024 yang berjudul “Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” Skripsi ini membahas bahwa dari total sebelas poin yang tercantum dalam “Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-

¹⁵ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah* (Pustaka Al Kautsar, 2013), 22.

MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” terdapat satu poin dalam bagian ketujuh yang mengatur mengenai "Ketentuan Destinasi Wisata" yang perlu mendapat perhatian khusus. Poin tersebut adalah poin kedelapan, yang menyatakan bahwa "Makanan dan minuman halal harus terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI." Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pandangan di kalangan pedagang bahwa sertifikat halal hanya diperlukan oleh perusahaan besar, sementara pelaku usaha berskala lebih kecil cenderung merasa bahwa mereka tidak memerlukan sertifikasi halal tersebut.¹⁶ Yang menjadi perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada lokasi penelitian, penelitian ini akan membahas lebih mendalam mengenai implementasi wisata syariah pada destinasi wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hariyanti tahun 2022 yang berjudul “Dampak Penerapan Wisata Halal terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Setanggor Kec. Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah” skripsi ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui dampak penerapan wisata halal terhadap ekonomi masyarakat serta peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Desa Setanggor, penerapan wisata halal telah memberikan dampak positif, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat.

¹⁶ Razwa Salma, “Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsnmui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

Banyaknya wisatawan yang berkunjung membuka peluang usaha baru bagi warga, yang pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, peran Dinas Pariwisata Lombok Tengah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator sudah cukup maksimal dalam membantu Desa Setanggor, melalui pemberian pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pokdarwis desa setempat. Perbedaan utama antara skripsi ini dan penelitian sebelumnya adalah fokus pada dampak penerapan wisata halal terhadap ekonomi masyarakat di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, menjelaskan penerapan wisata syariah pada destinasi wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin sesuai atau tidak sesuai dengan konsep wisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 dan juga akan menggali kendala-kendala terkait penerapan wisata syariah pada destinasi wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin.¹⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Khairunnisa Gazza tahun 2020 yang berjudul “Penerapan dan Pengembangan Wisata Halal Pasar Terapung di Banjarmasin” skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan dan pengembangan wisata halal pada pasar terapung di Banjarmasin yang mana subjek penelitiannya adalah Pejabat Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin dan pelaku atau pedagang di wisata halal pasar terapung. Di dalam skripsi

¹⁷ Harianti Harianti, “Dampak penerapan Wisata Halal terhadap ekonomi masyarakat Desa Setanggor Kec. Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah” (udergraduate, UIN Mataram, 2022), <https://etheses.uinmataram.ac.id/3763/>.

tersebut tidak hanya memfokuskan point-point dalam Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 akan tetapi dilengkapi juga dengan pengembangan wisata halal pada Pasar Terapung di Banjarmasin.¹⁸ Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah letak geografis pada penelitian yang dilakukan penulis terletak didaerah pegunungan dan masuk kewilayah perhutanan. Dengan perbedaan letak geografis tersebut penulis tertarik meneliti bagaimana penerapan wisata halal yang letak geografisnya tidak pada tempat tengah-tengah kota dan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.

4. Skripsi yang ditulis oleh Meika Novelia tahun 2023 yang berjudul “Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” skripsi ini membahas tiga hal utama. Pertama, status pengelolaan objek wisata Situs Sindang Pancuran yang berada di bawah naungan dan pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon serta Pemerintah Desa. Kedua, manajemen pengelolaan mencakup kegiatan ziarah kubur serta dzikir atau doa bersama di petilasan makam Mbah Sapu Jagat. Ketiga, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dalam pengelolaan objek wisata telah berjalan dengan baik, meskipun ada satu aspek yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu terkait

¹⁸ Rizka Khairunnisa Gazza dan Dr. Imron Rosyadi M. Ag, “Penerapan Dan Pengembangan Wisata Halal Pasar Terapung Di Banjarmasin” (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <https://doi.org/10/img001.pdf>.

dengan sertifikasi halal untuk penjual makanan dan minuman. Meskipun demikian, semua makanan dan minuman yang dijual sudah memiliki label atau cap halal dari MUI.¹⁹ Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis menjelaskan bagaimana penerapan wisata syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 yang fokusnya kepada pentingnya pada bagian ketujuh pada pembahasan yaitu “Ketentuan Destinasi Wisata” yang mencakup wisata umum tidak hanya religi.

5. Artikel yang ditulis oleh Nur Fadilah Sukmawardani, Nandang Ihwanudin, dan Popon Srisusilawati pada jurnal ilmiah Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Universitas Islam Bandung tahun 2023 yang berjudul “Wisata Halal dalam Konteks Kearifan Lokal Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimahi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016” artikel ini berfokus mengenai penerapan wisata halal dalam konteks Kearifan Lokal Dalam praktiknya, Penerapan wisata halal yang berkaitan dengan kearifan lokal bukanlah hal yang mudah, karena ada beberapa aspek kearifan lokal yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam pengembangan wisata halal, nilai-nilai kearifan lokal tetap memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Pengembangan wisata halal memerlukan kerjasama yang solid antara berbagai pihak. Nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat sosial, seperti gotong

¹⁹ M. Meika Novelia, “Pengelolaan Destinasi Wisata Religi Tujuh Mata Air Situs Sindang Pancuran Cirebon Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” (diploma, S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN SNJ, 2023), <http://syekhnurjati.ac.id>.

royong dan toleransi, sangat terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Cireundeu.²⁰ Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah: penulis menitikberatkan objek penelitian kepada mewujudkan kemaslahatan umum, Pencerahan, penyegaran dan penenangan, Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, terhindar dari Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan skripsi ini fokus pada kearifan lokal yang kemudian dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

G. Sistematika Penulisan

Agar materi pokok dapat dipahami dengan lebih mudah, diperlukan urutan penulisan yang sistematis. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini dalam lima bab yang menjadi komponen utama, sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendahuluan meliputi beberapa bagian, yaitu: Latar Belakang yang menjelaskan alasan dasar penulis dalam melakukan penelitian, Rumusan Masalah yang berisi pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini, Tujuan Penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai penulis, yaitu untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan, Definisi Operasional yang memberikan penjelasan tentang istilah-

²⁰ Nur Fadilah Sukmawardani, Popon Srisusilawati, dan Nandang Ihwanudin, "Wisata Halal Dalam Konteks Kearifan Lokal Kampung Adat Cireundeu Di Kota Cimahi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (6 Agustus 2023): 510–18, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8388>.

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, Kajian Pustaka yang membahas perbedaan-perbedaan dalam penelitian sebelumnya, dan Sistematika Penulisan yang berisi aturan atau pedoman dalam penulisan skripsi ini.

BAB II yaitu Landasan teori berisi teori-teori yang akan dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan, yang selanjutnya akan menghasilkan temuan penelitian. Dalam hal ini, landasan teori berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan destinasi wisata ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun teori yang penulis gunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah teori tentang pariwisata syariah.

BAB III yaitu metode penelitian sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan beberapa metode penelitian meliputi; 1) jenis dan sifat penelitian, 2) lokasi penelitian, 3) subjek dan objek penelitian, 4) data dan sumber data, 5) teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV yaitu Laporan hasil penelitian mencakup gambaran umum mengenai pelaksanaan wisata, penyajian data yang berkaitan dengan pelaksanaan destinasi wisata, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan tinjauan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

BAB V yaitu penutup berisi simpulan dan saran dari hasil analisis kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.